

**IMPLEMENTASI VISI MISI BUPATI INDRAGIRI HULU DALAM
PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2022**

Oleh : Gieat Fathur Rachman

Email : gieat.fathur0372@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

TELP/Fax. 0761-63277

Abstract

Indragiri Hulu Regency is an area that is rich in natural potential, historical value, arts and culture and has a variety of tourism potential that can be developed. The Indragiri Hulu Regency government is also aware of the huge potential of tourist destinations, which is reflected in the Vision and Mission of the Regent of Indragiri Hulu 2021-2026. The Vision of the Regent of Indragiri Hulu 2021-2026 is "Creating Integration for a More Prosperous Indragiri Hulu Community" and one of the Missions of the Regent of Indragiri Hulu 2021-2026 focuses on "Integrated Tourism and Creative Economy Development". However, it was reported that the vision and mission had not been implemented optimally due to the lack of optimal tourist destination management programs and inadequate funding. The theory used in this research is Political will from Derick (1999). This research aims to find out why the Regent of Indragiri Hulu did not make the tourism sector a priority sector in the development plan for Indragiri Hulu district in 2022, to find out the commitment to the vision and mission of the Regent of Indragiri Hulu regarding tourism and to find out the allocation of funds for Indragiri Hulu tourism in 2022. The data used in this research refers to data collected from interviews, field observations, and documentation supported by data published by several related agencies. The research indicators are program evaluation of the implementation of the Indragiri Hulu Regent's vision and mission, government initiatives, priorities, mobilization of political and public support, policies, fund allocation, continuity and adaptation. This data shows that the tourism sector is designated as a preferred sector as explained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 32 of 2004 and Law no. 23 of 2014. Even though it is a selected government affairs sector, the development and management of tourist destinations is one of the leading programs. However, the implementation of the vision and mission cannot be said to be optimal, especially with the minimal allocation of funds for Indragiri Hulu tourism in 2022. The government is committed to maximizing the implementation of the vision and mission in the future through several alternative initiatives.

Keywords: *Tourism, Indragiri Hulu, Vision and Mission*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan - pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Oktaviani.J, 2018).

Selain Implementasi, pengelolaan juga penting diperhatikan terutama agar seluruh potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana, prasarana maupun alokasi dana dalam suatu badan dapat digunakan secara efektif. Secara umum pengelolaan merupakan serangkaian mekanisme dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian sumber daya, dan implementasi untuk mencapai tujuan. Berfokus di bidang pariwisata pada penelitian ini, Pengelolaan pariwisata tidak hanya tentang kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, daya tarik dan ciri khas tersendiri suatu destinasi wisata, serta

kelompok sosial maupun komunitas yang bersangkutan dengan destinasi wisata. Sehingga bisa saja pengelolaan suatu destinasi wisata juga terdapat aktifitas lain yang dapat mendukung dalam sektor ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi destinasi wisata untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (*UU No 10 Tahun 2009*). Salah satu kawasan yang terkenal dengan destinasi pariwisatanya dan menjadi lokasi penelitian ini yakni Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Indragiri Hulu terbagi atas 14 kecamatan, 178 desa dan 16 kelurahan. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam, nilai sejarah, seni dan budaya serta memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni budaya melayu dan pembangunan ekonomi lokal. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, terkenal dengan mayoritas penduduknya Melayu Pesisir,

Talang Mamak dan selebihnya didiami penduduk pendatang seperti suku Jawa, Minang, Batak, Banjar dan Bugis. Kabupaten ini juga mempunyai beberapa destinasi wisata seperti daerah lainnya.

Kabupaten Indragiri Hulu setidaknya memiliki 88 objek wisata yang diantaranya 38 objek wisata alam, 16 objek wisata budaya, 10 objek wisata buatan, 9 objek wisata kuliner, 8 objek wisata sejarah, 4 objek wisata perbelanjaan, 2 objek wisata religi, dan objek wisata cagar alam. Destinasi wisata yang ada di kabupaten Indragiri Hulu sangat memiliki potensi yang cukup besar bagi pendapatan daerah apabila dapat dikelola dengan manajemen yang baik.

Pemerintah selaku pejabat yang berwenang harus memberikan perhatian lebih pada destinasi wisata yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan mengarahkan sektor ini sebagai investasi yang menguntungkan kedepannya serta memberikan asumsi yang baik bagi para wisatawan dalam kemudahan prosedur untuk mengikat daya tarik. Pada PERBUP Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kabupaten Indragiri Hulu sudah melimpahkan tugas dan fungsi terkait pengelolaan pariwisata kepada dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kabupaten Indragiri Hulu.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu serta telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

(RPJMD) Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyusun rencana strategis atau Renstra OPD Tahun 2021-2026 berupa dokumen operasional teknis tentang berbagai permasalahan umum, strategi, program, dan kebijakan untuk meningkatkan perkembangan pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada RPJMD dalam kurung waktu 5 tahun.

Renstra OPD Tahun 2021-2026 kemudian diaktualisasikan ke dalam Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu (Renja OPD) untuk periode satu tahun yakni pada tahun 2022 yang menitikberatkan pada rumusan rencana program dan kegiatan prioritas salah satunya terkait program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022.

Gambar 1.1 berita Visi Misi Bupati Tidak Didukung Dengan Anggaran

Visi Misi Bupati Inhu Tidak Didukung Anggaran

Usman 2021 - Indragiri Hulu
14/02/22 - 13:16 WIB



RIAUDETIL.COM, RENGAT – Salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Rezita Meylani Yopi SE dan Drs H Junaidi Rahmat M.Si tentang destinasi wisata ternyata tidak didukung anggaran.

Hal itu terungkap melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Inhu dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporasata) pada Senin (7/2/2022) lalu. Sehingga dikhawatirkan, visi dan misi tentang destinasi wisata tidak akan tercapai.

“Dari RDP, hanya ada anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 90 juta untuk penunjang kegiatan pada bidang Pariwisata. Padahal, di bidang pariwisata yakni pengembangan dan peningkatan destinasi wisata masuk dalam visi dan misi kepala daerah,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Inhu, Adila Ansori, Senin (14/2/2022).

Kondisi ini sebutnya, sangat disayangkan. Karena untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah tidak didukung anggaran. Bahkan dengan ketersediaan anggaran yang ada, disanksikan tidak akan tercapai.

Sumber : riaudetil.com

Namun masalahnya adalah pengembangan pariwisata menjadi salah satu visi misi di kabupaten Indragiri hulu yang belum berjalan dengan maksimal di kabupaten tersebut dikarenakan kurang maksimalnya pengelolaan dinas pariwisata dalam menjalankan program tersebut untuk memajukan bidang wisata di kabupaten indragiri hulu dan tidak memadainya pendanaan yang di berikan oleh pemerintah kabupaten Indragiri hulu untuk melaksanakan dan memajukan wisata di daerah tersebut, sesuai dengan berita di atas mengenai visi misi bupati inhu tidak didukung anggaran.

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

“ Mengapa Bupati Indragiri Hulu tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas dalam rencana pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022? ”

KERANGKA TEORITIS

1. Political Will

Teoritis *Political Will* merujuk pada kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha keberlanjutan (Brinkerhoff dalam (Fauzy, 2015)). Konsep mengenai *Political Will* merupakan sebuah tindakan atau kemauan yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin ditetapkan disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai keberlanjutan.

Terdapat empat fase utama yang mewakili proses transformasi kemauan politik dalam merumuskan kebijakan diantaranya agenda, desain, implementasi, dan evaluasi. Penetapan agenda berfokus pada fenomena atau permasalahan yang masuk ke dalam agenda pemerintah dengan mengumpulkan informasi dan bersiap untuk mengembangkan strategi. Pada tahap desain, pemerintah menjalankan tugasnya dalam menyusun strategi dan mempersiapkan tindakan untuk pengembangan *Political Will* yang diperlukan untuk implementasi. Implementasi merupakan tahap dimana pemerintah bertindak untuk menggerakkan dan melaksanakan program yang didukung oleh berbagai aktor politik terutama untuk mendapatkan pendanaan, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan yang diakhiri oleh

evaluasi dengan mempertimbangkan proses hasil dan pencapaian program terhadap tujuan yang telah ditetapkan serta berbagai kemungkinan yang ditemukan (Lezine, 2012).

Kurangnya *Political Will* menjadi pernyataan yang paling umum digunakan oleh para politisi, aktivis peneliti, akademis dan profesional lainnya untuk berargumentasi mengenai tidak adanya atau kurangnya implementasi pemerintah terhadap suatu kebijakan. Efisiensi negara dan pemerintah sebanding dengan efisiensi kebijakan yang telah dikembangkan dan dilaksanakan. Ketika pemerintah merumuskan sebuah agenda, mengalokasikan kekuasaan, sumber daya manusia, dana dan undang-undang maka pemerintah menjadi aktor utama dalam merealisasikannya secara efektif. Sehingga *Political Will* dapat menjadi instrumen dalam memastikan penerapan strategi serta menjelaskan prioritas, ketercapaian dan kegagalan dari kebijakan publik yang telah dirumuskan (Kukutschka, 2014).

Political Will pemerintah dapat diukur dengan beberapa indikator. Brinkerhoff mengemukakan setidaknya ada 6 komponen *Political Will* yaitu : 1) inisiatif pemerintah; 2) pilihan kebijakan atau program; 3) mobilisasi aktor politik/para pihak; 4) komitmen publik dan alokasi sumberdaya; 5) keberlanjutan usaha; 6) belajar dan beradaptasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang sistematis, dimana penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah wawancara, dokumentasi, pengamatan lapangan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan – laporan dokumenter yang terkait dengan penerapan implementasi visi misi bupati indragiri hulu dalam pengelolaan destinasi wisata indragiri hulu tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI VISI MISI BUPATI INDRAGITI HULU DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022

1. Bupati Indragiri Hulu tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas dalam rencana pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui mengapa Bupati Indragiri Hulu tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas dalam rencana pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022. Analisis ini didasarkan pada Visi dan Misi Bupati Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 serta evaluasi dari realisasi program-program menurut analisis *Political Will*.

Political Will merujuk pada kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha keberlanjutan. Implementasi Visi dan misi tidak dapat dilepaskan dengan *Political Will* terutama dalam upaya menciptakan *good governance* sesuai dengan tujuan dan visi misi yang telah ditetapkan.

1. Inisiatif pemerintah

Inisiatif Pemerintah berasal dari pemikiran dan tindakan yang melahirkan visi misi yang disalurkan menjadi agenda yang berbentuk beberapa program real ataupun kebijakan dalam upaya pengembangan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Indragiri Hulu. Visi dari Bupati Indragiri Hulu tahun 2022 adalah “*Merajut Keterpaduan untuk Masyarakat Indragiri Hulu Lebih Sejahtera*”.

Visi pembangunan pariwisata daerah yang tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Indragiri Hulu tahun 2017-2025 yakni “*terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis alam yang didukung budaya yang berkelanjutan, berdaya saing menuju masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera*”. Sementara misi dalam pembangunan kepariwisataan daerah diantaranya:

1. Mewujudkan destinasi pariwisata berbasis alam yang didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, dan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Mengembangkan organisasi pemerintah daerah, swasta dan

masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Inisiatif pemerintah yang dimuat dalam visi dan misi Pembangunan Kepariwisata Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, mewujudkan pariwisata industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, mengembangkan kelembagaan kepariwisataan, mengembangkan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan industri pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Realisasi inisiatif ini dituangkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (RPJMD) Tahun 2021-2026.

2. Prioritas

Prioritas dapat dinilai ketika pemerintah menentukan program maupun kebijakan dalam upaya realisasi visi dan misi berdasarkan analisis strategi, pilihan kebijakan/program, pertimbangan teknis, peninjauan biaya, dan manfaat. Dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu menempatkan sektor pariwisata pada sektor urusan pemerintah pilihan. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Ketetapan ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa urusan yang menjadi kewenangan

daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Merujuk pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan prioritas pada tahun 2022, 3 Destinasi wisata yakni Danau Menduyan, Danau Raja, dan Camping Ground (Rantau Langsung) memerlukan pengelolaan terhadap rehabilitasi sarana dan prasarana, fasilitas, promosi, dan Fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan ekonomi kreatif.

3. Mobilitasi Dukungan Politik

Mobilitasi Dukungan Politik terlihat dari sejauh mana aktor publik turut berkonsultasi, terlibat dan memobilisasi stakeholder dalam upaya pengembangan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun dalam perkembangannya, pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Indragiri Hulu yang didukung oleh aktor politik lain dan stakeholder pariwisata juga dikatakan belum terealisasi.

Upaya untuk mengonsolidasikan dukungan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya masih dalam tahap awal yakni pencarian dan pengajuan pada investor. Sehingga dalam kurung waktu tersebut, pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Indragiri Hulu untuk 3 destinasi prioritas hingga saat ini masih bergantung pada APBD I dan APBD II dengan APBD murni sebesar Rp.99.850.000,00 untuk tahun 2022.

4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen menggambarkan kewajiban yang melekat pada diri seseorang terhadap orang lain, tindakan maupun hal tertentu. Komitmen pemerintah terlihat dari tindakan yang dilakukan secara sukarela serta dorongan yang konsisten dari pemerintah kepada masyarakat dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Salah satu sumber daya utama adalah alokasi dana. Indragiri Hulu memiliki APBD murni sebesar Rp.99.850.000,00 dengan APBD perubahan sebesar Rp. 1.490.269.350,00 yang kemudian melalui dana tersebut terdapat beberapa kegiatan dalam rangka pengelolaan destinasi wisata termasuk mendorong komitmen publik dalam hal inovasi dan kreatifitas yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berhubungan dengan implementasi regulasi pemerintah Indragiri Hulu dalam upaya pengembangan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Indragiri Hulu. Regulasi pemerintah Indragiri Hulu terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata tercantum dalam (RIPPARDA) tahun 2017-2025 pada pasal 4 memuat adanya visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan indikasi program-program yang lebih terperinci terkait pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017-2025.

Selain melalui RIPPARDA) tahun 2017-2025, regulasi pemerintah Indragiri Hulu dalam upaya pengembangan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Indragiri Hulu juga tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (RPJMD) Tahun 2021-2026 menjelaskan mengenai tujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dengan sasaran mengembangkan destinasi wisata melalui strategi peningkatan pengelolaan destinasi wisata dengan arah kebijakan meningkatkan aksesibilitas

destinasi wisata yang menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyusun rencana strategis atau Renstra OPD Tahun 2021-2026 yang berbentuk dokumen operasional teknis tentang berbagai permasalahan umum, strategi, program, dan kebijakan untuk meningkatkan perkembangan dan pengelolaan pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada RPJMD dalam kurun waktu 5 tahun.

6. Keberlanjutan Usaha/Kontinuitas

Keberlanjutan Usaha dapat diukur dari implemtasi program berdasarkan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Selain itu, keberlanjutan usaha juga dilihat dari kecukupan dana dalam implementasi pengembangan program. Dalam hal ini, pengembangan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Indragiri Hulu termasuk ke dalam impelentasi jangka menengah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Terkait alokasi dana, temuan menunjukkan bahwa alokasi dana yang ditetapkan untuk pengelolaan destinasi wisata pada tahun 2022 yakni senilai Rp.99.850.000,00 dikatakan kurang/minim dalam menunjang pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Indradiri Hulu.

7. Belajar dan Adaptasi

Bupati Indragiri Hulu 2022 telah memiliki visi misi yaitu Keterpaduan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya pengembangan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Indragiri Hulu dengan beberapa program.

Program-program yang telah dibentuk dapat dilaksanakan dengan cukup baik.

Namun implementasi yang dilakukan masih belum memberikan pengaruh yang signifikan dan maksimal terhadap pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pada 3 destinasi unggulan yakni Danau Menduyan, Danau Raja, dan Rantau Langsat. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta lapangan yang menunjukkan adanya permasalahan secara umum Kabupaten Indragiri Hulu pada bidang Pariwisata diantaranya:

1. Kurangnya aksesibilitas dan amenitas destinasi wisata
2. Masih rendahnya pengelolaan destinasi wisata oleh masyarakat dan stakeholder pariwisata.
3. Masih rendahnya APBD Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pengelolaan destinasi wisata yang ada.
4. Perkembangan jumlah dan inovasi objek wisata yang kurang optimal
5. Penerimaan yang di dapat lebih kecil dari pada pengelolaannya

KESIMPULAN

Berdasarkan pada teori, hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Bupati Indragiri Hulu menempatkan sektor pariwisata pada sektor urusan pemerintah pilihan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. Walaupun menjadi sektor urusan pemerintah pilihan, pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata menjadi salah satu program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu.

Ketercapain visi dan misi dalam pengelolaan pariwisata tersebut dapat terlihat dari proses strategi dan kebijakan yang diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program. Pemerintah menyadari bahwa walaupun implementasi program telah berjalan dengan baik, namun hal tersebut masih belum maksimal terutama dengan minimnya alokasi dana pariwisata Indragiri Hulu tahun 2022 dan beberapa permasalahan umum yang dihadapi.

Permasalahan umum tersebut, khususnya pada pengelolaan sarana prasana dan anggaran menggambarkan bagaimana pengelolaan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu belum menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022. Walaupun demikian pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya sektor pariwisata optimis dalam mengembangkan dan memajukan pariwisata Indragiri Hulu ke depannya. Pemerintah berkomitmen untuk dapat memaksimalkan implementasi dari visi dan misi, terutama dalam segala aspek yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu kedepannya dengan beberapa inisiatif seperti mengiatkan pelatihan terhadap masyarakat dalam hal promosi dan digitalisasi, alokasi dana, serta telah berusaha dalam mencari stakeholder ataupun pihak ketiga untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Kabupaten Indragiri Hulu.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian maka penulis memberikan saran-saran terkait implementasi visi dan misi bupati Indragiri

Hulu dalam pengelolaan destinasi wisata Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata khususnya pada sarana dan prasarana fisik, maka diperlukannya peningkatan alokasi dana yang cukup. Disisi lain pengenalan digitalisasi dan peningkatan inovasi juga perlu ditingkat untuk memperbanyak ragam destinasi wisata dan trik promosi sehingga tidak kalah saing dengan destinasi wisata di daerah-daerah lain. Hal yang terpenting adalah diperlukannya kolaborasi maksimal dari setiap komponen mulai dari pemerintah, dukungan stakeholder, hingga masyarakat dalam menjaga dan aktif dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dino Abazovic dan Asim Mujkic. (2015). *Political Will: A Short Introduction Case Study - Bosnia and Herzegovina Sarajevo*. Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Fauziah Eddyono. (2019). *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Ponorogo, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Inu Kencana Syafii. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- John S. Dryzek, Bonnie Honig dan Anne Phillip. (2006). *Political Theory (Paranoia an Political Philosophy)*

- uk: department in Oxford University Press.
- Muhadam Labolo. (2013). *“Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu Kajian, Teori, Konsep, Pengembangannya)”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mason. (2003). *Tourism Impact, Planning and Managemen*. uk: department in Oxford.
- Ricky W. Griffin. (2016). *Fundamental og Management, Eighth Edition*. Cnada: Nelson Education, Ltd.
- Safitri, W. (2019). *Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*. 104.
- Sukarwanto. (2023). *Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka (Indragiri Hulu Regency in Figures 2023)*. Rengat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu.
- Titin Rohayatin. (2021). *“Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan”*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jurnal**
- Agustana, I. K. M. A. Dan P. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. 13(1), 13–26. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/705>.
- Auradian Marta. 2016. *"Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Ekowisata : (Studi di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)"*. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 13 (22) Tahun 2016. <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/30>.
- Azizah, W. I., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). *Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Masyarakat Desa Political Will Of Jombang District Government On Poverty Reduction In Village Communities*. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik, 1(April), 50–62. <http://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/viewFile/6/11>
- Dessy Alencia Lumban Gaol dan Siti Sofro Sidiq. (2018). *Pelaksanaan Promosi Objek Wisata Danau Menduyan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*. JOM FISIP. Vol. 05. Edisi II Juli-Desember 2018. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/22502>
- Dimas Rangga Agustin, Hanny Purnamasari, Kariena Febriantini. (2020). *Political Will Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Memulihkan Ekonomi Negara di Era Pandemi*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 8,(11), 353-364. <file:///C:/Users/HP/Downloads/1836-Article%20Text-5256-1-10-20220720-1.pdf>
- Dwihapsari Lestarinings Tyas dan Achmad Djunaedi. (2023). *Dinamika Perkembangan Pariwisata Kawasan Danau (Studi Kasus: Kawasan Danau Raja Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)*. Jurnal Pariwisata dan Budaya. Vol. 24. No. 04 Tahun 2023.

- <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/74396/41188>
- Ebi Hidayat, Nurasmalaturrahmah Dwi Putri, dan Yudhanto Satyagraha Adiputra. (2021). *Political Will Pemerintah Kota Tanjung Pinang Periode 2018-2023 Dalam Penataan Ruang Kota Lama*. Student Online Juornal. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Vol. 02. No.02 Tahun 2021. <http://repositori.umrah.ac.id/2308/>
- Hambali. (2016). *Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekan Baru Tahun 2015-2016*. Ilmu Pemerintahan FISIPOL, Universitas Riau, 4(2), 1–2. <https://www.neliti.com/id/publications/206700/kepemimpinan-lurah-dalam-meningkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-d>
- Lezine Dequiny A, Reed, Gerald A. (2012). *Political Will: A Bridge Between Public Health Knowledge and Action*. American Journal of Public Health. Vol. 97. No. 11. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2040380/>
- Masriana. (2019). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Pantai Ide Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur*. Unniversitas Muhammadiyah Makassar, 1–125. https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/7232-Full_Text.Pdf
- Mirza dan Siti Aisyah. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia. Vol. 01. No. 01 Desember 2020. <https://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/18>
- Mochamad Ridwan Satya Nurhakim. (2014). *Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. XI No. 03 Desember 2014. [file:///C:/Users/HP/Downloads/admin,+02._Pengaruh+Implementasi+\(403-422\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/admin,+02._Pengaruh+Implementasi+(403-422).pdf)
- Nurfadila. (2018). *Skripsi Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang*. Journal Of Controlled Release, 11(2), 84. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/467-Full_Text.pdf
- Oktaviani.J. (2018). Tinjauan Pustaka: *Pengertian Implementasi*. Sereal Untuk, 51(1), 51. <file:///C:/Users/HP/Downloads/2421-4986-1-PB.pdf>
- Setiono, S. T., Afrizal, T., Supriyono, E., Wendra, R. M., & Nurfitriani, A. (2021). *Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Semarang*. Perspektif, 10(1), 26–35. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V10i1.3943>
- Siti Nazurah. (2022). *Political Will Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengadaan Air Bersih Tahun 2018-*

2019. JOM FISIP. Vol. 09 Edisi II Januari-Desember 2022. file:///C:/Users/HP/Downloads/32993-63903-1-SM.pdf

Wahyuningsih, S. (2018). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba*. Bitkom Research, 63(2), 1–3. http://Forschungsunion.De/Pdf/Industrie_4_0_Umsetzungsempfehlungen.Pdf
https://Www.Dfki.De/Fileadmin/User_Upload/Import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-Online.Pdf
<https://Www.Bitkom.Org/Sites/Default/Files/Pdf/Presse/Anhaenge-An-Pis/2018/180607> -Bitkom

Undang-Undang

PERDA KAB.INHU NO 4 TAHUN 2008. (N.D.).

PERDA KAB. INHU NO.4 Tahun 2018

Perda No 1 Tahun 2022 Kab. Indragiri Hulu - Kompres.Pdf. (N.D.).

PERBUP Nomor 68 Tahun 2021

RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2026

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022

UU NO 10 TAHUN 2009. (2009). 27(7), 1–5.

Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958

Undang-Undang nomor 6 Tahun 1965

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Internet/Website Resmi

DPMPTSP Kabupaten Indragiri hulu. 2022. “ *Profil Kabupaten Inhu*”. Dengan link: https://dpmptsp.inhukab.go.id/index.php?com=halutama&link=profil_inhu . Diakses pada 08 Juni 2023.

Derick W. Brinkerhoff dan Nicolas P. Kulibaba. (1999). *Identifying and Assessing Political Will or Anti-Corruption Effort*. USAID's Implementing Policy Change Project. No. 13 Jan. 1999. Dengan link: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnacm026.pdf. Diakses pada 08 Juni 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, 2019. “*Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu Kategori Kependudukan*”. Dengan link: <https://inhukab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>. Diakses pada 10 Juni 2023

Inhukab.go.id. 2017. “*Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu (profil)*”. Dengan link: <https://disporapar.inhukab.go.id/>. Diakses pada 15 Agustus 2023

jdih.kemenparekraf.go.id. 2012. “*Pedoman Kelompok Sadar Wisata*”. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. dengan link:

https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data_puu/regulation_subject_1593767304_pm35um001mpek2012.pdf.
Diakses pada 12 Juni 2023.

Dinas Pariwisata Provinsi Riau. 2023. "*Objek Wisata Camping Ground Bukit Tiga Puluh*". Jemari.Riau.go.id. Dengan link: <https://jemari.riau.go.id/objek-wisata/camping-ground-bukit-tiga-puluh>. Diakses pada 12 Juni 2023.

Redkoranriaudotco. 2019. "Era Bupati Yopi Kunjungan Wisatawan ke Inhu Meningkatkan". koranriau.co. Dengan link: <http://www.koranriau.co/2019/12/era-bupati-yopi-kunjungan-wisatawan-ke.html?m=1>. Diakses pada 12 Juni 2023.

Roberto Matinez B. Kukutschka. 2014. "*Building Political Will; Topic Guide (Compiled by the Anti-Corruption Helpdesk)*". Transparency International. Dengan link: https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Topic_Guide-_Political_Will.pdf. Diakses pada 12 Juni 2023.

Riauantara.co. 2023. "*Inhu Miliki Desa Wisata yang Bagus, Kadispar Riau: Lakukan Koordinasi Agar Bersama Dapat Menarik Dana Kementerian*". riauantara.co. Dengan link: <https://www.riauantara.co/2023/05/inhu-miliki-desa-wisata-yang-bagus.html>. Diakses pada 12 Juni 2023.

Riaupos.co. 2019. "*Kunjungan Wisatawan di Indragiri Hulu Tahun 2019 Melebihi Target*". riaupos.co. Dengan link:

<https://riaupos.jawapos.com/advertoria/1/15/12/2019/217235/kunjungan-wisatawan-di-indragiri-hulu-tahun-2019-melebihi-target.html>. Diakses pada 12 Juni 2023.

Theo Rizky. 2022. "*Wujudkan Desa Wisata di Desa Kelesa, Diasporapar Lantik Pokdarwis Danau Kembar Inhu*". tribunnews.com. Dengan link: <https://tribunpekanbarutravel.tribunnews.com/2022/06/21/wujudkan-desa-wisata-di-desa-kelesa-disporapar-lantik-pokdarwis-danau-kembarinhu>. Diakses pada 12 Juni 2023.

